

DESAIN DESTINASI PARIWISATA HALAL DI JAWA BARAT MENUJU PARIWISATA BERKELANJUTAN

Alvien Septian Haerisma

Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

alvienseptian@uinssc.ac.id

Abdul Ghoni

Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

abdulghoni19@uinssc.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendesain pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat. Mencari keseimbangan tantangan dan hambatan dari desain pengembangan pariwisata halal. Mereformulasikan teori yang relevan terkait dengan desain destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat berbasis pariwisata berkelanjutan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif yang mendeskripsikan, menganalisis dan mengklasifikasikan pengembangan destinasi pariwisata halal. Data *primer* yang digali dari Dinas Pariwisata provinsi Jawa Barat sebagai subjek penelitian dan data *sekunder* dari pelaku pariwisata Jawa Barat dan para *stakeholder* yang terlibat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) Survey ke Dinas pariwisata provinsi Jawa Barat. (2) Wawancara dilakukan tidak terstruktur dengan kepala dinas, kepala bidang dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, (3) Observasi dilakukan dengan cara nonpartisipan, (4) Dokumentasi dari kunjungan ke dinas pariwisata provinsi Jawa Barat dan menggali literatur berupa buku, artikel jurnal, majalah dan pemberitaan media online yang terkait tema ini. Desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat didukung oleh keindahan alam, budaya lokal yang kaya, serta populasi muslim yang signifikan. Desain pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat fokus pada pengintegrasian fasilitas yang ramah muslim, seperti ketersediaan tempat ibadah, penginapan yang memenuhi standar syariah, dan restoran bersertifikat halal. Implementasi menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kapasitas infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan akademisi menjadi faktor kunci dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan sektor swasta dan komunitas lokal menjadi pelaku utama dalam penyediaan layanan *halal friendly*. Kolaborasi ini memperkuat daya saing Jawa Barat di pasar pariwisata halal global dan mendukung tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang. Tantangan utama dalam pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat termasuk kurangnya pemahaman mengenai standar halal di kalangan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan destinasi wisata halal di negara lain.

Keywords: *destinasi, halal, pariwisata berkelanjutan*

A. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi dengan populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan pasar yang Indonesia memiliki potensi dengan populasi muslim terbesar di dunia dan merupakan pasar yang potensial bagi industri pariwisata halal. Pada tahun 2021 pariwisata halal Indonesia berada di peringkat keempat dan kedua pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Indonesia meraih posisi ranking pertama dalam Mastercard - CrescentRating Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023 di Singapura (Marini, 2023). Prestasi dalam GMTI tersebut seyogyanya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional dan global (Lahny & Abduttawwab, 2019). Pariwisata halal di Indonesia telah menjadi tren yang berkembang, seiring dengan kampanye pemerintah Indonesia “*The Halal Wonders*” yang berdampak positif dalam peningkatan kunjungan wisatawan muslim maupun dana pengeluarannya dalam berwisata (Winarti, 2017).

Data tahun 2022, terdapat 110 juta wisatawan muslim internasional menyumbang 12% dari seluruh kunjungan wisatawan internasional. Jumlah wisatawan muslim meningkat sekitar 140 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan bertambah sebesar 160 juta pada tahun 2024. Kunjungan wisatawan secara global diprediksi mengalami peningkatan mencapai 230 juta pada tahun 2028 dengan perkiraan pengeluaran sebesar USD 225 Miliar (Widyanti, 2023).

Sejak tahun 2017, pemerintah Indonesia pun telah memperkenalkan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas dalam industri pariwisata halal. IMTI berupaya untuk meningkatkan indeks daya saing destinasi dan industri pariwisata halal secara keseluruhan. IMTI menggunakan kerangka ACES dari CrescentRating, yang digunakan dalam GMTI, untuk menilai setiap provinsi di Indonesia mengenai pariwisata halal (Nathalia Nugrahani, 2018)

Hasil Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2023 memberikan penilaian kesiapan dan daya tarik lima belas provinsi berbeda yang memiliki potensi destinasi wisatawan muslim di Indonesia. IMTI telah memberikan skor untuk meningkatkan daya tarik pariwisata halal untuk masing-masing provinsi dengan berfokus pada domain akses (*access*), komunikasi (*communication*), lingkungan (*environment*) dan layanan (*service*) (Nathalia Nugrahani, 2018). Data yang disajikan 10 provinsi teratas, sebagai berikut:

Tabel 1
Peringkat IMTI 2023

Provinsi	IMTI 2023 Score	IMTI 2023 Rank
Nusa Tenggara Barat	67	1
Aceh	63	2
Sumatera Barat	62	3
DKI Jakarta	60	4
Jawa Tengah	59	5
Jawa Barat	56	6
DI Yogyakarta	53	7
Jawa Timur	52	8
Sulawesi Selatan	51	9
Kalimantan Selatan	49	10

Sumber: IMTI Report, 2023

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat yaitu peraturan pemerintah, pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda et al., 2020). Tantangan lainnya masih belum optimalnya penyedia layanan bagi para wisatawan oleh pihak stakeholder yang berwenang. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, wilayah provinsi Jawa Barat ini berpotensi menjadi tujuan wisata halal terkemuka, dengan populasi muslim yang kuat dan dukungan pemerintah (Qory et al., 2021). Namun terdapat kesenjangan antara persepsi dan preferensi wisatawan terhadap pariwisata halal di wilayah tersebut (Siregar, 2018). Konsep pariwisata halal di Jawa Barat baru menekankan pada makanan dan fasilitas yang sesuai syariah, namun implementasinya masih dalam proses perbaikan (Zaenuri et al., 2021).

Pariwisata berkelanjutan merupakan isu kompleks bagi pemegang kepentingan yang bertujuan untuk menstimulasi eksploitasi sumber daya alam secara seimbang pada tingkat lokal dan pembatasan sosial dan dampak lingkungan (Battaglia, 2017). Perkembangan pariwisata halal berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu industri unggulan perekonomian negara memerlukan perencanaan yang tepat dan tantangan seperti keselamatan, mobilitas, dan aksesibilitas lanjutan untuk menjaga keberlanjutannya (Peristiwo, 2021).

Berbagai tinjauan literatur ini menyoroti hubungan pengembangan destinasi pariwisata halal dengan pariwisata berkelanjutan. Selain itu hubungan antara nilai-nilai sosial, jasa pariwisata, dan ketentuan Islam sebagai peta jalan ke depan untuk penelitian dan pengembangan industri pariwisata halal yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan penelitian yang memerlukan jawaban bagaimana desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat menuju pariwisata berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif bertujuan mendeskripsikan, menganalisis dan mengklasifikasikan penyelidikan untuk menghasilkan desain pengembangan destinasi pariwisata halal di provinsi Jawa Barat menuju pariwisata berkelanjutan. Studi kasus dalam penelitian ini di provinsi Jawa Barat di terkait pemerintah provinsi Jawa Barat Dinas Pariwisata provinsi Jawa Barat dan para *stakeholder* terkait pariwisata di provinsi Jawa Barat. Dinas Pariwisata provinsi Jawa Barat dan para *stakeholder* mendukung pendekatan partisipatif untuk pengembangan pariwisata halal di provinsi Jawa Barat.

Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan melalui survey di provinsi Jawa Barat, observasi, wawancara mendalam dengan Dinas pariwisata provinsi Jawa Barat dan stakeholder lainnya serta dokumentasi terkait berbagai literatur yang relevan dengan tema ini.

Unsur “FOUR A DESTINATIONS” digunakan sebagai metode pengumpulan data yang sistematis. “FOUR A DESTINATIONS” adalah singkatan dari: Attraction, Accesibility, Aminity, Ancillary (tabel 2). Pengumpulan data berdasarkan unsur “FOUR A DESTINATIONS” dapat memandu kita untuk mengidentifikasi bagaimana melakukan pendekatan partisipatoris: apakah perlu setting tertentu? Siapa saja peserta yang paling penting untuk dilibatkan? dalam bahasa apa atau dengan cara apa pendekatan partisipatif dilakukan? Apakah ada norma-norma lokal yang harus kita pahami untuk melakukan pendekatan partisipatif secara efektif? pertanyaan-pertanyaan seperti ini dapat membantu kita dalam merinci hal-hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pendekatan partisipatif.

Tabel 2
UNSUR “FOUR A DESTINATIONS”

Destinasi	Deskripsi
<i>Attraction</i> (Atraksi/Daya Tarik)	Keberadaan atraksi yang menjadi role model di Jawa Barat mencakup daya Tarik alam, budaya dan buatan
<i>Accessibility</i> (Aksesibilitas)	Infrastruktur dan kebutuhan koordinasi antar Lembaga meliputi infrastruktur jalan serta transportasi publik dan pribadi
<i>Amenity</i> (Fasilitas)	Fasilitas yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim (akomodasi, restaurant halal, fasilitas publik)
<i>Ancillary</i> (Layanan Pendukung)	Pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas layanan (pemandu wisata, edukasi dan promosi, sistem sertifikasi halal)

Sumber: (Rustini et al., 2022)

Penelitian ini melakukan wawancara mendalam pada pihak berwenang dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, para pelaku usaha dan wisatawan sebagai teknik untuk mengumpulkan

data tentang kebijakan, implementasi serta kendala dan hambatan dalam desain pengembangan destinasi pariwisata halal. Observasi dan wawancara dilakukan di Kantor dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, area Bandros, Masjid Al-Jabar serta destinasi Sariater-Subang- Jawa Barat selama 2 minggu. Selain kegiatan sehari-hari, kami juga mengamati para wisatawan yang hadir di destinasi yang kami kunjungi pada bulan Oktober dan November 2024. Hal ini berguna memahami bagaimana pendekatan partisipatif yang diimplementasikan oleh pihak berwenang dan para *stakeholder* juga wisatawan dan dirasakan sebagai proses pencarian informasi dan persepsi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat.

Setelah mengumpulkan data, kami melakukan proses pengkodean menggunakan QSR Nvivo Pro 12, sebuah perangkat lunak penelitian kualitatif (Bazeley and Jackson, 2013). Kami melakukan dua langkah proses pengkodean: (1) kisi-kisi 'FOUR A DESTINATIONS' dan (2) proses pengkodean Miles, Huberman, & Sadana yang meliputi pengkodean deskriptif, *in vivo*, proses, evaluasi, emosi, dan nilai-nilai. Proses pengkodean membantu kami dalam menjelaskan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mendukung pendekatan partisipatif.

Teknik analisis secara kualitatif melakukan proses bekerjanya sebuah data menurut (Miles & Huberman, 1984) dengan melakukan tahapan melalui 3 proses sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pandangan (Behringer et al., 2024) menyebutkan tahapan analisis data di atas disebut dengan model analisis interaktif, hal ini berguna untuk menganalisis data yang terkumpul mengenai pengembangan destinasi pariwisata halal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat

Prioritas strategi dalam mengembangkan pariwisata halal di Jawa Barat adalah dari aspek sinergi. Pendapat lain menyatakan bahwa pariwisata halal di Jawa Barat dapat dikembangkan melalui dukungan dari berbagai lintas Lembaga. Lintas Lembaga ini merupakan sinergi antara lembaga yang terkait dengan pariwisata halal di Jawa Barat (Ahyani et al., 2022). Stekholder atau lembaga yang terkait dengan pariwisata halal, yaitu dinas pariwisata provinsi Jawa Barat, pengusaha hotel, kuliner, pengelola objek wisata dan akademisi. Sehingga pariwisata halal di Jawa Barat dapat berkembang menjadi salah satu pusat wisata halal di Indonesia (Huda et al., 2020).

Pariwisata halal semakin dikenal sebagai pendorong potensial pertumbuhan ekonomi dan pengembangan destinasi. Faktor-faktor utama yang memengaruhi niat wisatawan muslim untuk mengunjungi destinasi halal antara lain pemasaran halal, atribut destinasi,

dan nilai yang (Devi & Firmansyah, 2019) . Atribut daya saing destinasi, seperti sumber daya utama, faktor pendukung, dan manajemen destinasi, memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan niat berkunjung wisatawan (Pangestuti, 20117).

Pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan, tetapi menunjukkan potensi untuk berkembang. Isu-isu utama meliputi aturan pelaksanaan, pengetahuan masyarakat, dan ketersediaan makanan halal (Huda et al., 2020). Pengembangan ekosistem pariwisata ramah muslim membutuhkan fasilitas tambahan seperti ruang ibadah dan pilihan makanan halal, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (CHSE) (S. Santoso et al., 2020).

Untuk meningkatkan pariwisata halal, para pemangku kepentingan harus fokus pada peningkatan infrastruktur, promosi, layanan, dan aspek lingkungan. Pendekatan ini dapat berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan dan memposisikan negara seperti Indonesia sebagai destinasi pariwisata halal terkemuka (S. Santoso et al., 2020).

Bandung, kota utama di Jawa Barat, diuntungkan oleh dukungan pemerintah yang kuat, berbagai destinasi wisata, dan fasilitas keagamaan, tetapi menghadapi persaingan dari daerah lain yang mengembangkan pariwisata halal (Qory et al., 2021). Hal ini dinyatakan berhasil, provinsi Jawa Barat harus memanfaatkan kekuatannya, mengatasi kelemahan, dan mengimplementasikan rencana strategis untuk menjadi destinasi pariwisata halal terkemuka. Pariwisata halal di provinsi Jawa Barat telah memenuhi semua tipe pariwisata berkelanjutan yang tercantum dalam Permen Parekras nomor 9 tahun 2021 tentang pedoman destinasi pariwisata halal berkelanjutan yang terdiri dari perkotaan, pedesaan, pegunungan dan pesisir atau kombinasi keempatnya.

2. Implementasi Desain Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Menuju Pariwisata Keberlanjutan

a) Pengembangan Atraksi/Daya Tarik (*Taurism Attraction*)

Pengembangan Atraksi/Daya Tarik sebagai bagian dari pariwisata halal harus komitmen menuju pariwisata berkelanjutan yang mematuhi syariat Islam dalam setiap aspek, seperti atraksi, makanan, akomodasi dan aktivitas wisata. Model Atraksi/Daya Tarik sesuai nilai halal itu berupa fasilitas ramah muslim seperti arah kiblat tempat wudhu, sajadah di hotel, serta pemisahan makanan halal dan non-halal (Dina S, Wawancara, 12 Oktober 2024).

Implementasi dalam model Atraksi/Daya Tarik dalam pengembangan pariwisata Halal lebih mengedepankan ramah muslim didalamnya termasuk atraksi alam seperti kawah putri, Pantai pangandaran, dan wisata religi di Cirebon. Fokusnya adalah integrasi

fasilitas seperti ibadah, restoran halal, dan penginapan syariah (Henri, H, wawancara, 05 Oktober 2024). Selain itu, edukasi kepada masyarakat lokal penting untuk memahami kebutuhan wisatawan muslim (Henderson, 2015).

b) Peningkatan Aksesibilitas (*Accessibility*)

Upaya peningkatan aksesibilitas di provinsi Jawa Barat mencakup pengembangan jalan, transportasi publik, dan aplikasi digital yang menyediakan informasi tentang restoran halal, tempat ibadah, dan fasilitas wisata lainnya. Hal ini bertujuan mempermudah mobilitas wisatawan, khususnya di destinasi seperti Puncak, Lembang dan Pangandaran (Rifauddin & Ardiyawin, 2024).

Pemerintah provinsi Jawa Barat yang bermitra dengan pihak swasta dalam penyediaan fasilitas ibadah seperti masjid dan mushola di destinasi wisata menjadi prioritas, disertai pengembangan atraksi budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam, misalnya di Cirebon dan Tasikmalaya (Saputra et al., 2019). Komitmen dalam peningkatan aksesibilitas mendukung pariwisata berkelanjutan melalui penerapan desain universal yang ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, serta penggunaan teknologi digital untuk efisiensi sumber daya (Gillovic & McIntosh, 2020).

Unsur aksesibilitas dalam pengembangan destinasi pariwisata halal harus mencakup enam prinsip utama: kemudahan, keandalan, keamanan, kepercayaan, keterbukaan, dan peningkatan berkelanjutan. Model ini memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah sekaligus mendukung Pembangunan ekonomi lokal (Sumaryadi et al., 2020). Atribut aksesibilitas dalam destinasi halal tidak hanya memberikan kenyamanan fisik melalui fasilitas halal, tetapi juga membangun hubungan emosional yang meningkatkan loyalitas wisatawan dan mendorong kunjungan ulang (Misbahuddin et al., 2025)

c) Penyediaan Fasilitas (*Amenity*)

Fasilitas ini mendukung kenyamanan dan kebutuhan spiritual wisatawan, seperti mushola dan tempat wudhu yang mudah diakses (Mohsin et al., 2020). Sebuah destinasi halal dikatakan *muslim friendly*/ramah muslim, seyogyanya harus memenuhi fasilitas bersifat pokok/daruriyah yang berupa sebagai berikut: fasilitas ibadah dalam destinasi seperti mushola, masjid, dan tempat wudhu menjadi elemen penting di destinasi wisata halal. Destinasi seperti Kawah Putri dan Pantai Pangandaran menyediakan fasilitas ibadah strategi yang meningkatkan kepuasan wisatawan muslim (Henderson, 2015).

Area destinasi harus tersedia juga penginapan/ hotel berbasis syariah. Provinsi Jawa Barat sudah terdapat hotel-hotel yang berbasis syariah mulai menyediakan layanan

berbasis syariah, seperti makanan halal, privasi yang terjaga, dan perlengkapan ibadah di kamar. Hal ini meningkatkan loyalitas wisatawan terhadap destinasi (Widodo et al., 2022). Disamping itu, hotel tersebut menyediakan restoran dengan fasilitas makanan dan minuman halal. Restoran bersertifikat halal dan di destinasi wisata utama seperti Bandung menjadi daya tarik bagi wisatawan muslim, Pemerintah bekerja sama dengan MUI untuk memperluas sertifikasi halal, terutama di daerah terpencil (Al-ansi & Han, 2020). Unsur fasilitas lainnya harus ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan limbah, diintegrasikan di destinasi wisata alam, mendukung keberlanjutan pariwisata halal (Buckley, 2019).

d) Pengembangan Layanan Pendukung (*Ancillary*)

Provinsi Jawa Barat, memiliki layanan ini dan berkembang di kota-kota utama seperti Bandung dan Bogor melalui bank syariah dan asuransi perjalanan halal (Widodo et al., 2022). Bank Syariah yang terdapat di provinsi Jawa Barat telah menyediakan layanan syariah, termasuk ATM Syariah di destinasi utama. Ini memastikan transaksi keuangan wisatawan sesuai syariah, mendukung pengalaman mereka selama perjalanan (Adinugroho et al., 2024).

Layanan transportasi halalpun disiapkan untuk mempermudah perjalanan wisatawan ke destinasi yang dituju. Transportasi halal mencakup kendaraan umum bersih, taksi halal, dan bus wisata dengan fasilitas ibadah. Penyedia layanan di Jawa Barat juga menawarkan rute perjalanan yang mencakup Lokasi ibadah dan restoran halal, yang meningkatkan pengalaman wisatawan muslim. Layanan tambahan juga berupa informasi dan teknologi pendukung seperti aplikasi digital menyediakan informasi tentang tempat makanan halal, penginapan syariah dan lokasi ibadah, memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim (Peristiwo, 2021).

Pemerintah provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan pihak swasta menyebutkan bahwa teknologi ini membantu merencanakan perjalanan yang sesuai syariah sambil mendukung keberlanjutan melalui pengurangan penggunaan kertas (Chantarungsri & Alam, 2022).

3. Kolaborasi Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat Dapat Mendorong Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah setempat berperan sebagai regulator dan fasilitator, menyediakan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung sertifikasi halal serta keberlanjutan (Henderson, 2015). Pelaku usaha dalam sektor pariwisata mendorong inovasi layanan *halal-friendly*, dengan dukungan sertifikasi dan pelatihan (Junaidi et al., 2019). Melibatkan

komunitas lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata halal di daerah tertentu dalam rangka keterlibatan dan pemberdayaan komunitas lokal. Keterlibatan tersebut bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian budaya (Saputra et al., 2019).

Pemerintah provinsi Jawa Barat mengajak kolaborasi antara akademisi, pelaku usaha dan stakeholder lainnya. Kolaborasi berbagai pihak sangat penting untuk mencapai keberlanjutan pariwisata halal di Jawa Barat. Edukasi, promosi, dan koordinasi menjadi kunci mengatasi tantangan, dengan tetap mempertimbangkan nilai lokal dan standar internasional (L. Santoso & Cahyani, 1905). Pemerintah provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam kolaborasi tersebut. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang standar halal dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Battour & Ismail, 2015).

4. Tantangan Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Provinsi Jawa Barat dan Strategi Untuk Mencapai Pariwisata Berkelanjutan

a) Pengembangan Atraksi/Daya Tarik (*Tourism Attraction*)

Tantangan pengembangan atraksi/daya Tarik di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman standar halal, yaitu banyak pengelola wisata belum memahami kebutuhan wisatawan muslim terkait fasilitas dan layanan (Henderson, 2015).
- 2) Keterbatasan infrastruktur, yaitu minimnya fasilitas ibadah dan transportasi ramah muslim menjadi kendala utama (Battour & Ismail, 2015).
- 3) Adaptasi budaya lokal, yaitu kesadaran Masyarakat lokal terhadap prinsip syariah masih rendah (Saputra et al., 2019).
- 4) Sertifikasi Halal, yaitu proses sertifikasi yang rumit dan pengawasan yang tidak konsisten menghambat kepercayaan wisatawan (Widodo et al., 2022).
- 5) Persaingan global, di Jawa Barat menghadapi kompetisi dengan destinasi lain, seperti Malaysia dan Turki, dalam menarik wisatawan halal (Putri, 2023).

b) Peningkatan Aksesibilitas (*Accessibility*)

Tantangan peningkatan aksesibilitas di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur fisik terbatas, yaitu kurangnya fasilitas seperti musholah, tempat wudhu, dan restoran halal di beberapa destinasi wisata, terutama di Kawasan terpencil, menjadi kendala utama (Battour & Ismail, 2015).
- 2) Keterbatasan akses transportasi umum, yaitu sulitnya transportasi umum menuju destinasi wisata halal mengurangi daya tarik wisatawan, terutama mereka yang berpegian bersama keluarga (Buckley, 2019).

- 3) urangnya fasilitas ibadah di sepanjang rute wisata, yaitu ketersediaan fasilitas ibadah yang memadai sepanjang perjalanan membatasi kenyamanan wisatawan muslim (Henderson, 2015).
- 4) Kesadaran rendah penyedia layanan, yaitu minimnya pemahaman akan kebutuhan wisatawan muslim, seperti waktu ibadah dan makanan halal, mengurangi tingkat kepuasan (Mursid & Hidayat, 2024).
- 5) Regulasi kurang mendukung, yaitu pemerintah perlu menciptakan regulasi yang spesifik untuk mendukung penyediaan layanan halal di destinasi wisata (Henderson, 2015).
- 6) Kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, yaitu insentif bagi peaku usaha yang menyediakan layanan halal serta kemitraan dengan komunitas lokal dapat mendukung pengembangan pariwisata halal (Ghozani & Adinugraha, 2024).

c) Penyediaan Fasilitas (*Amenity*)

Tantangan penyediaan fasilitas (*amenity*) di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Kurangnya fasilitas halal standar, yaitu banyak destinasi di Jawa Barat, seperti Pantai Pangandaran dan Kawah Putih, belum dilengkapi fasilitas ibadah dan kuliner halal yang memadai, sehingga menyulitkan wisatawan muslim.
- 2) Ketidakseimbangan distribusi fasilitas, yaitu fasilitas halal seperti mushola dan restoran halal umumnya terkonsentrasi di perkotaan, sementara destinasi di pedesaan atau terpencil sering kekurangan fasilitas tersebut.
- 3) Keterbatasan sumber daya, yaitu banyak pengelola destinasi yang kekurangan anggaran dan tenaga profesional untuk menyediakan fasilitas halal yang memenuhi standar internasional (Saputra et al., 2019)
- 4) Kurangnya sertifikasi halal dan kuliner, yaitu restoran dan tempat makan di kawasan wisata sering kali belum memiliki sertifikasi halal, sehingga menurunkan kepercayaan wisatawan muslim keamanan makanan (Widodo et al., 2022).
- 5) Pengelolaan lingkungan yang kurang baik, yaitu beberapa destinasi populer di Jawa Barat menghadapi masalah pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan, yang dapat memengaruhi keberlanjutan pariwisata (Buckley, 2019).

d) Pengembangan Layanan Pendukung (*Ancillary*)

Tantangan dalam pengembangan layanan pendukung di provinsi Jawa Barat, sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan akses keuangan syariah, yaitu banyak daerah wisata di Jawa Barat, terutama yang terpencil, masih kekurangan layanan keuangan berbasis syariah seperti ATM syariah. Ini mempersulit wisatawan muslim untuk melakukan transaksi sesuai prinsip syariah.
- 2) Transportasi ramah muslim, yaitu fasilitas ibadah di transportasi umum masih minim, sehingga menyulitkan wisatawan muslim kewajiban ibadah.
- 3) Minimnya informasi wisata halal, yaitu informasi tentang fasilitas halal, seperti restoran atau tempat ibadah, masih terbatas sehingga mengurangi kepuasan wisatawan (Battour & Ismail, 2015).
- 4) Standar layanan tidak konsisten, yaitu banyak layanan yang belum mengikuti standar halal yang ketat, menciptakan keraguan di kalangan wisatawan (Widodo et al., 2022).
- 5) Resistensi pelaku usaha non-muslim, yaitu beberapa pelaku usaha enggan menerapkan konsep halal karena khawatir membatasi pasar atau memerlukan investasi besar.

D. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian mengenai desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat dan telah diuraikan dalam beberapa pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat memiliki potensi besar dalam mengembangkan destinasi pariwisata halal, didukung oleh keindahan alam, budaya lokal yang kaya, serta populasi muslim yang signifikan. Desain pengembangan pariwisata halal di Jawa Barat fokus pada pengintegrasian fasilitas yang ramah muslim, seperti ketersediaan tempat ibadah, penginapan yang memenuhi standar syariah, dan restoran bersertifikat halal. Strategi ini sejalan dengan tren pariwisata berkelanjutan, di mana aspek lingkungan, sosial, dan budaya menjadi perhatian utama.
2. Implementasi desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kapasitas infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisatawan muslim. Implementasi ini telah dimulai dengan pengembangan atraksi alam yang mendukung wisata halal, seperti ekowisata yang dilengkapi dengan fasilitas ramah lingkungan dan ramah muslim.

3. Kolaborasi dalam pengembangan destinasi pariwisata halal dilakukan antara pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, dan akademisi menjadi faktor kunci dalam pengembangan destinasi pariwisata halal yang berkelanjutan. Pemerintah berperan sebagai regulator, sedangkan sektor swasta dan komunitas lokal menjadi pelaku utama dalam penyediaan layanan *halal friendly*. Kolaborasi ini memperkuat daya saing Jawa Barat di pasar pariwisata halal global dan mendukung tujuan keberlanjutan dalam jangka panjang.
4. Tantangan utama dalam pengembangan destinasi wisata halal di Jawa Barat termasuk kurangnya pemahaman mengenai standar halal di kalangan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur, dan persaingan dengan destinasi wisata halal di negara lain. Strategi pengembangan destinasi pariwisata halal di Jawa Barat dalam rangka mengatasi tantangan ini, diperlukan edukasi yang berkelanjutan bagi pelaku usaha dan komunitas lokal serta penguatan regulasi dan sertifikasi halal.

E. Rekomendasi dan Saran

Beranjak dari jawaban rumusan masalah tersebut, beberapa rekomendasi guna perbaikan desain pengembangan destinasi pariwisata halal provinsi Jawa Barat yang didasarkan pada temuan-temuan di lapangan. Beberapa point masih diperlukan perbaikan lebih lanjut, diantaranya:

1. Pemerintah harus terus meningkatkan infrastruktur yang ramah muslim, khususnya di destinasi wisata alam dan budaya utama di Jawa Barat.
2. Sistem sertifikasi halal perlu diperkuat untuk memastikan konsistensi dalam layanan yang diberikan oleh hotel, restoran, dan atraksi wisata.
3. Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan swasta untuk menyediakan fasilitas ibadah di berbagai destinasi wisata.
4. Implementasi konsep ekowisata yang ramah muslim perlu diperluas, dengan penekanan pada pelestarian lingkungan di destinasi wisata alam, seperti pantai dan pegunungan.
5. Pemerintah perlu terus mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan melalui insentif kebijakan yang mendukung sektor pariwisata halal.
6. Akademisi dan peneliti perlu dilibatkan secara aktif dalam melakukan riset dan evaluasi terhadap pengembangan pariwisata halal, terutama terkait dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

7. Program edukasi dan pelatihan tentang standar halal harus diperluas untuk meningkatkan pemahaman di kalangan pelaku usaha wisata.
8. Sertifikasi halal yang transparan dan mudah diakses harus diprioritaskan untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan terhadap layanan yang ditawarkan di Jawa Barat.

F. Referensi

- Adinugroho, M., Efendi, M. N., & Zuhdi, U. (2024). Mengoptimalkan Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Wisata Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), Peristiwa, H. (2021). The Role of Transportation t.
- Ahyani, H., Putra, H. M., & Mutmainah, N. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengembangan kawasan industri pariwisata halal di jawa barat. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 4(1), 15–42.
- Al-ansi, A., & Han, H. (2020). Journal of Destination Marketing & Management Role of halal-friendly destination performances , value , satisfaction , and trust in generating destination image and loyalty. *Journal of Destination Marketing & Management*, 13(May 2019), 51–60. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.05.007>.
- Battaglia, M. (2017). Sustainability in the Tourism Business. *Emerging Issues in Management*, 3, 122–134.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2015). Halal tourism : Concepts , practises , challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.
- Behringer, M., Hirmer, P., Villanueva, A., Rapp, J., & Mitschang, B. (2024). Enhancing Data Trustworthiness in Explorative Analysis : An Interactive Approach for Data Quality Monitoring. *SN Computer Science*, 5. <https://doi.org/10.1007/s42979-024-02781-w>.
- Buckley, R. (2019). Tourism and the Sustainability of Human Societies RALF. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(5), 732–746.
- Chantarungsri, C., & Alam, A. (2022). Sustainable Strategies for Halal Tourism Infrastructure in the Digital Age : Integrating Architecture , Urban Planning , and Technology. *International Summit On Science Technology and Humainty*, 165–179.
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2019). Developing Halal Travel And Halal Tourism To Promote Economic Growth: A Confirmatory Analysis. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 193–214.
- Ghozani, S., & Adinugraha, H. H. (2024). Analysis of the Role of Government and Private Sector in Halal Tourism Development : Case Studies in Indonesia and Hong. *JJurnal Sahmiyya*, 3(2), 373–383.

- Gillovic, B., & McIntosh, A. (2020). Accessibility and Inclusive Tourism Development : Current State and Future Agenda. *Sustainability*, 12(22), 97–22.
- Haerisma, A. S. (2018). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 153-168. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i2.3679>.
- Haerisma, A. S., Ahdi, M., & Asari, A. H. (2021). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kewirausahaan di Pondok Pesantren Alam Saung Balong Al-Barokah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 232-245. <https://doi.org/10.70095/dimasejati.v3i2.9325>.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i2.19437>.
- Henderson, J. C. (2015). Halal food , certi fi cation and halal tourism : Insights from Malaysia and Singapore. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160–164. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.006>.
- Huda, N., Rini, N., & Hidayat, S. (2020). Problem and Solution Models for Halal Tourism Development in West Java. *International Conference on Humanities, Education, and Social Sciences*, 708–720.
- Junaidi, Suci, A., Nanda, S. T., & Kadaryanto, B. (2019). Halal-friendly Tourism Business Process: Tourism Operators In Indonesia. *Journal of Tourism and Geosites*, 27(4), 1148–1157.
- Lahny, & Abduttawwab, M. (2019). Halal recreation potential in Indonesia in improving tourists and the global economy. *Munich Personal RePEc Archive*, 94902.
- Marini, S. (2023). *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia*. Kneks Go.Id.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publication.
- Misbahuddin, Irwan Misbach, & M, R. A. (2025). The Effect Of Attractiveness, Accessibility, And Halal Attributes On Return Interest In Religious Tourism At The 99 Dome Mosque In Makassar With Visitor Satisfaction As An Intervening Variable. *Journal of Sharia Economics*, 8(1), 2382–2399.
- Mohsin, A., Ramli, N., & Abdulaziz, B. (2020). Halal tourism : Emerging opportunities. *Tourism Management Perspectives*, 19(2015), 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>.
- Mursid, A., & Hidayat, D. S. (2024). The Effect Of Halal Awareness In Enhancing Muslim Travellers Experience And Satisfaction Through Religious Respect. *Jurnal Bisnis Dan Ilmu Sosial*.
- Nathalia Nugrahani. (2018). *Inaugural Indonesia Muslim Travel Index Reveals Lombok, Aceh*,

- and Jakarta as New Key Destinations for Halal Tourism*. Crescent Rating. <https://www.crescentrating.com/magazine/press-releases/3995/inaugural-indonesia-muslim-travel-index-reveals-lombok-aceh-and-jakarta-as-new-key-destinations-for-halal-tourism>.
- Pangestuti, E. (20117). Analisis Daya Saing Dengan Menggunakan Destination (Studi Pada Heritage Tourism Di Jawa). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 11(1), 41–51.
- Peristiwo, H. (2021). The Role of Transportation to Support The Sustainability Halal Tourism in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(148), Peristiwo, H. (2021). The Role of Transportation t.
- Putri, T. S. (2023). Comparing The Concept Of Halal Tourism In Indonesia And Turkey Using Aces Crescenrating Model. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 2(3), 2830–2850.
- Qory, S., Ulya, S., Royani, W., & Dewi, Y. (2021). Destinasi pariwisata halal di Kota Bandung. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 99–106.
- Rifauddin, M., & Ardiyawin, I. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Transparansi Destinasi Wisata Halal di Indonesia. *Journal of Sharia Economy and Islamic Tourism*, 4(2), 82–92.
- Rustini, Widagyo, K. G., & Maulida, A. R. (2022). Identifikasi potensi wisata minat khusus dengan menggunakan konsep 3a+1i (attraction, accessibility, amenity, institution) di situ rawa binong desa hegarmukti kabupaten bekasi. *Jurnal Bisnis Event*, 3(12), 89–95.
- Santoso, L., & Cahyani, Y. T. (1905). Pentahelix ' s Collaboration In The Development of Halal Tourism For Sustainable Regional Economic Development. *Jurnak Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 222–237. <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v9i2.6822>.
- Santoso, S., Hadibrata, B., Nurhidajat, R., Widyanty, W., Ana, A., Ubaidillah, R., & Isa, S. M. (2020). Study On Development Strategies of Muslim-Friendly Tourism Ecosystem. *Available at SSRN 3875184*.
- Saputra, G. R., Zaenuri, M., Purnomo, E. P., & Fridayani, H. D. (2019). Kemitraan Pengelolaan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 (Studi Kasus Objek Wisata Gunung Galunggung Kabupaten Tasikmalaya) Gustian. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 03(1), 298–341.
- Siregar, D. S. (2018). Perceptions and Preferences of Muslim Domestic Tourists in Indonesia as a Halal Tourism Destination (Case Study : Halal Tourism in West Java). *International Journal of Humanities, Arts and Social Sciences*, 4(5), 194–202.
- Sumaryadi, Sutono, A., Rahtomo, W., Rumayar, christian helmy, & Puksi, faisal fahdian. (2020). Smart Halal Destination Ecosystem: The Exploration of Halal Tourism Ecosystem Model. *Journal of Community Services in Tourism*, 1, 29–48. <https://doi.org/10.34013/mp.v1i1.345>.
- Widodo, S., Helmi, S., Nurbaity, A., & Lumbanraja, P. (2022). Halal Tourism : Development , Challenges and Opportunities. *Frontiers in Business and Economics*, 1(August), 50–58.

- Widyanti, N. N. W. (2023). *Kedatangan Wisatawan Muslim Diprediksi Capai 230 Juta pada 2028*. Kompas.Com. <https://travel.kompas.com/read/2023/06/06/100556027/jumlah-kedatangan-wisatawan-muslim-diprediksi-capai-230-juta-pada-2028>.
- Winarti, O. (2017). Halal Tourism in Indonesia : Does it attract only Muslim Tourists. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(November), 232–239. <https://doi.org/10.25139/jsk.v1i3.139>.
- Zaenuri, M., Hasan, Y. A., Handari, S., Muhammad, W., & Iqbal, A. M. (2021). Halal Tourism Concepts and Policies : Case in West Nusa Tenggara. *Education and Humanities Research*, 518, 18–25.